



APBD Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

★ Pastikan APBD Berjalan Maksimal, Bupati Gde Agung Pimpin Rapat Evaluasi APBD Triwulan I Tahun 2015

MANGUPURA, NusaBali

Guna memastikan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung berjalan dengan maksimal sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka Bupati Badung Anak Agung Gde Agung memimpin langsung rapat evaluasi untuk memonitor dan mengendalikan pelaksanaan APBD Triwulan I tahun 2015.

Rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap akhir Triwulan tiap tahun ini guna melihat hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2014) untuk dijadikan tolok ukur dan bahan komparasi pelaksanaan anggaran di tahun 2015.

Dalam Rapat Evaluasi yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kompyang R Swandika tersebut juga terungkap bahwa secara kuantitas, realisasi yang dicapai pada tahun anggaran 2014 sudah cukup baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,79 persen serta capaian belanja modal sebesar 84,68 persen dan melalui pemilihan penyedia barang/jasa secara transparan yang telah dilakukan menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi yaitu sebesar 16,30 persen (Rp 191.255.940.118). "Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja seluruh pimpinan SKPD beserta staf yang telah bekerja keras sehingga kinerja pemerintahan dan capaian pembangunan di Kabupaten Badung menunjukkan hasil yang membanggakan sehingga pemerintah pusat memberikan atensi khusus termasuk kehadiran langsung Mendagri secara khusus di kabupaten Badung ini salah satu bukti bahwa kinerja kita mendapat apresiasi dari Kemendagri, oleh karenanya apa yang telah kita capai hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa yang akan datang," kata Bupati Badung AA Gde Agung, saat Rapat Evaluasi Triwulan Pertama APBD TA 2015 di Ruang Kertha Gosana, Kamis (2/4) lalu.

Selain agenda evaluasi, pada rapat tersebut juga dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Badung No. 58 tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Badung oleh Kepala Kantor Arsip AA Ngurah Arimbawa. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Gde Agung, Wabup I Made Sudiana, Sekda Badung Kompyang R. Swandika serta pejabat lengkap lingkup Pemkab Badung termasuk, Camat, Lurah serta sekretaris SKPD di Badung.

Berkenaan dengan komitmen melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menjadi stimulan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Bupati Gde Agung menjelaskan bahwa dalam era keterbukaan sekarang ini, khususnya dibidang pengadaan barang/jasa, semakin dituntut untuk memenuhi prinsip transparansi pengadaan. Sesuai komitmen Pemkab Badung guna menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kabupaten Badung berjalan bersih dan transparan, bupati mengingatkan kepada para Kepala SKPD agar memperhatikan dengan baik kewajiban terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. "Kepala SKPD agar selalu berkoordinasi dengan Kepala LPSE dan Kepala ULP terkait hal tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam



BUPATI A.A. Gde Agung bersama Wabup Made Sudiana dan Sekda Kompyang Swandika saat Rapat Evaluasi APBD Triwulan I Tahun 2015 di Puspem Badung, Kamis (2/4) lalu.

memenuh prinsip transparansi pengadaan tersebut," pinta Bupati.

Ditambahkan bahwa pada pertengahan bulan Januari yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Januari 2015, Presiden mengeluarkan instruksi berkaitan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Instruksi ini harus disikapi secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif. Bupati juga minta perhatian anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tetap menjaga kinerja yang sudah dicapai selama ini sehingga penetapan APBD selalu tepat waktu. Sehingga Kepala SKPD sudah bisa mengumumkan RUP tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Hal ini penting karena merupakan keharusan sesuai aturan juga untuk bisa mempercepat pelaksanaan pelelangan. Yang paling penting dari instruksi tersebut adalah proses pengadaan barang/jasa harus sudah selesai paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

"Kami memahami instruksi ini sulit dipenuhi karena awal tahun terjadi perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan terbitnya Perpres No 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga beberapa bagian dokumen pengadaan memerlukan perubahan. Tetapi sebagai abdi negara kita tetap harus semaksimal mungkin mampu mengikuti instruksi tersebut," kata Bupati.

Berdasarkan data sampai dengan minggu ketiga bulan Maret 2015, paket pengadaan yang sudah diterima di ULP berjumlah 278 paket sedangkan kalau dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya pada minggu ketiga bulan maret 2014 sudah mencapai 363 paket. Walaupun terkendala oleh perubahan peraturan, tetapi Bupati berharap agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dipercepat sehingga selain berkolerasi terhadap serapan anggaran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. @

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 14



Pastika Beri

'Lampu Hijau' Perusda

★ Untuk Kelola Taman Budaya Bali

"Tidak perlu munafik, memang semuanya 'ngayah' (bekerja dengan ikhlas)? harus 'mayah' atau bayar juga. Saya bukan apa-apa, seni itu harus makan orangnya, dan untuk kasih makan harus pakai duit"

**(Gubernur Bali,
Made Mangku Pastika)**

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan wacana pengelolaan Taman Budaya (Art Center) oleh Perusda Bali bukan untuk tujuan komersialisasi. "Bukan berarti komersialisasi, tetapi semacam retribusi, karena ada sesuatu yang diberikan, maka ada sesuatu yang juga diberikan kembali," kata Pastika saat memberi keterangan pada wartawan

di Press Room Pemprov Bali, Kamis, Kamis (2/4).

Pihaknya sependapat jika Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar mahasiswanya berpraktik di Taman Budaya karena dapat menjadi semacam laboratorium praktiknya. "Saya 'kan dikritik terus kenapa kok Art Center itu hanya ramai saat PKB, kenapa tidak tiap hari ada kegiatan di sana karena namanya pusat seni, seni segala macam yang penting temanya Bali. Kira-kira arahnya ke sana," ujarnya.

Namun, ucap dia, kalau kegiatan seperti itu digelar tiap hari, tentunya memerlukan uang untuk pembiayaannya. "Apa sepenuhnya dibiayai APBD. Kalau dibiayai APBD, harus ada duit juga yang masuk ke APBD untuk mengurusinya," tegasnya.

Pastika mengatakan selama ini biaya pengelolaan Taman Budaya sudah cukup besar. Apalagi jika Taman Budaya dibuat 'hidup' setiap hari tentunya harus dipikirkan biaya konsumsi kepada para penari, pembayaran listrik, memperbaiki alat-alat yang kemungkinan rusak hingga menjaga kebersihan dan kalau bisa memberikan honor untuk anak-anak yang menari supaya lebih

bersemangat

"Darimana duitnya, apa mesti dari APBD? Jadi, bukan dikomersialkan, tetapi ada untuk membiayainya karena masih banyak masyarakat Bali yang hidup kelaparan," ujarnya.

Pastika menegaskan, para seniman itu harus punya masa depan, dan optimalisasi Taman Budaya itu sebagai bentuk apresiasi pada seniman karena di sana bisa dipamerkan juga produk-produk kerajinan yang memang berkualitas. "Tidak perlu munafik, memang semuanya 'ngayah' (bekerja dengan ikhlas)? harus 'mayah' atau bayar juga. Saya bukan apa-apa, seni itu harus makan orangnya, dan untuk kasih makan harus pakai duit," katanya.

Pastika menambahkan, jikapun ada uang yang masuk dari optimalisasi Taman Budaya, dipastikan itu tidak akan membebani masyarakat secara berlebihan dan wacana untuk melibatkan Perusda Bali dalam langkah tersebut karena merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah.

"Bukan komersialisasi, kalau komersialisasi semata-mata profit ini untuk benefit Perusda harus ikut daripada diserahkan ke swasta karena untungnya juga nanti masuk



Sambungan -

ke provinsi," katanya.

Sebelumnya Perusda Bali mengusulkan kepada Pemprov Bali agar diberi kewenangan turut mengelola Taman Budaya untuk bisa mendatangkan pendapatan yang lebih optimal. "Jika usulan kami ini disetujui, tentunya kami akan mengelola Taman Budaya itu di luar kegiatan Pesta Kesenian Bali yang memang telah rutin digelar setiap tahun," kata Direktur Perusda Bali Nyoman Baskara belum lama ini.

Sementara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali menolak wacana komersialisasi Art Center Denpasar dan berharap menjadi sarana konservasi budaya. "Kami prihatin jika Taman Budaya diwastanisasi atau dikelola perusahaan. Biarlah kalau tidak sakral, minimal tetap profan. Jangan dikomersialkan," kata Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dalam diskusi 'Optimalisasi Taman Budaya' di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar, Rabu (1/4) lalu.

Mantan Bupati Gianyar itu berpandangan tidak tepat kalau Taman Budaya itu ditargetkan menghasilkan uang bagi pemerintah daerah. Kalau demikian adanya, lanjut

dia, maka sangat disayangkan karena 3,6 juta wisatawan asing datang ke Bali untuk menikmati kebudayaan daerah. "Uangnya itu datang lewat pajak hotel dan restoran (PHR) dan jangan Taman Budaya disuruh mendatangkan uang," ucap pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu.

Menurut dia, jika suatu saat setelah kegiatan di Taman Budaya (seperti Pesta Kesenian Bali) mendatangkan uang, maka sebenarnya bukan tujuan utama. Justru sebaliknya terus diadakan berbagai kegiatan seni dan ketika ada wisatawan datang akan mendapatkan manfaatnya tanpa dibebani target apa pun.

Untuk mendapatkan pendanaan dalam menjaga kelestarian Taman Budaya, Cok Ace menyarankan Dinas Kebudayaan dapat memanfaatkan dari dana PHR itu. "Dari sisi anggaran sebenarnya tidak masalah, dan mari kita kembalikan pada niat awal adanya Taman Budaya itu," katanya.

Ia menganalogikan Taman Budaya sebagai pohon mangga. Oleh sebab itu perlu mencari tukang tanam yang mengerti mangga untuk dirawat dan dipanen. **ant, nat**

hal. 2

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 3